

Abstract

Gender mainstreaming is one of the strategies to overcome the still ambiguous gender understanding in our society. When discussing about gender, the community will immediately relate to male and female gender. Most people do not understand that gender is a role created by social construction that exists in the community itself. Government tries to take a role to accommodate the existence of women, especially in the country development. It's done to improve the position of Indonesian government in supporting gender equality which is still low in the international community's perspective. Ministry of Finance is one of the three Ministries that pioneered gender mainstreaming in government organizations. This research focuses on internal organization communication in the implementation of gender mainstreaming in the Directorate General of Treasury. Researcher examines the significance of gender mainstreaming for organizations, the strategies undertaken in disseminating gender mainstreaming, policies that support the existence of gender equality, and barriers encountered in the dissemination process. In addition, the researcher also explains the achievements that have been obtained by the organization. The researcher used Karl Weick's Organizational Information Theory point of view and Mansour Fakih's concept of gender injustice to support the researcher in writing the findings. Weick's theory will observe the finding from the perspective of meaning and policy, while Fakih's is focused more on influence of policies issued on gender equality in organizations. The researcher used qualitative method, using informant and supporting documents as the main data sources. The novelty in gender mainstreaming for organizations is the challenge and also the limitation of this research at once, so that the informants and supporting documents can become obstacles also.

Key words: Gender, Gender Mainstreaming, Internal Communication, Organizational Information Theory

Intisari

Pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi untuk mengatasi pemahaman gender yang masih ambigu dalam masyarakat kita. Ketika membahas gender, masyarakat akan serta merta mengkaitkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa gender merupakan peran yang diciptakan oleh konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Pemerintah mencoba mengambil peran untuk mengakomodir keberadaan perempuan terutama dalam pembangunan. Hal ini dilakukan salah satunya untuk memperbaiki posisi pemerintah Indonesia dalam mendukung kesetaraan gender yang masih rendah di mata dunia internasional. Kementerian Keuangan menjadi satu dari tiga Kementerian yang mempelopori pengarusutamaan gender dalam organisasi pemerintah. Penelitian ini menitikberatkan pada komunikasi internal organisasi dalam penerapan pengarusutamaan gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peneliti meneliti makna pengarusutamaan gender bagi organisasi, strategi yang dilakukan dalam menyebarkan pengarusutamaan gender, kebijakan-kebijakan yang mendukung adanya kesetaraan gender, serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penyebaran ini. Selain itu peneliti akan memaparkan capaian yang sudah didapat oleh organisasi. Peneliti menggunakan sudut pandang Teori Informasi Organisasi Karl Weick dan konsep ketidakadilan gender Mansour Fakih untuk membantu penulisan temuan-temuan yang didapatkan oleh peneliti. Teori Weick akan melihat dari sudut pandang makna dan kebijakan, sedangkan Fakih akan melihat dari pengaruh kebijakan yang dikeluarkan terhadap kesetaraan gender di organisasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan sumber data inti dari informan serta dokumen-dokumen pendukung. Tantangan yang sekaligus menjadi batasan dari penelitian ini adalah kebaruan pengarusutamaan gender bagi organisasi, sehingga informan dan dokumen pendukungpun bisa menjadi kendala.

Kata Kunci: Gender, Pengarusutamaan Gender, Komunikasi Internal, Teori Informasi Organisasi